

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan selama ini dipercaya sebagai salah satu aspek yang menjembatani manusia dengan cita-cita yang diharapkannya. Karena berhubungan dengan harapan, wajar jika banyak pihak menganggap pendidikan itu sangat penting. Urgensi pendidikan bagi manusia tidak sekedar memperoleh pengetahuan saja, di dalamnya mereka berharap untuk jadi lebih manusiawi. Melalui pendidikan, manusia berekspektasi untuk merdeka, memiliki keyakinan terhadap langkah dan jalan yang benar, serta mengalami ketentraman hidup sebagai makhluk spiritual dan makhluk sosial. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut, pendidikan harus kongruen dengan kebutuhan dan fitrah manusia yang berhubungan dengan aspek-aspek materiil maupun imateriil.

Secara konstitusi, Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menempatkan pengertian pendidikan di ranah yang sangat ideal, yaitu:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pada perspektif undang-undang di atas, paradigma pendidikan seyogyanya mengacu pada konsep pendidikan komprehensif yang menyentuh penguatan spiritual, karakter, intelektual, dan sikap partisipatif. Hal ini tentu saja meniscayakan peran pendidikan dalam membentuk pengalaman dan pemahaman belajar yang utuh serta membantu masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami dirinya, lingkungan tempat dia hidup, dan juga mendorong pembelajar untuk peka dan turut serta dalam mengatasi masalah-masalah di lingkungannya.

Dalam pengertian yang hampir sama, Ivan Illich mengatakan bahwa suatu sistem pendidikan yang baik sedikitnya mengemban tiga tujuan, diantaranya:

Mubarak Ahmad, 2014

PENERAPAN PEMBELAJARAN PPKn BERNUANSA PROFETIK UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN BERDEMOKRASI MAHASISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | \upi.edu perpustakaan.upi.edu

1. Memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat;
2. Memungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat dengan mudah melakukannya, demikian pula bagi yang ingin mendapatkannya;
3. Menjamin tersedianya sarana umum yang berkenaan dengan pendidikan (Mudyahardjo, 2006: 49).

Berdasarkan tujuan pendidikan yang disampaikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pendidikan hendaknya dimaknai sebagai upaya untuk membantu manusia mencapai realitas diri dengan mengoptimalkan semua potensi kemanusiaannya. Dengan pengertian ini, semua proses yang mengarah pada terwujudnya optimalisasi potensi manusia tanpa memandang tempat dan waktu dikategorikan sebagai kegiatan pendidikan. Sebaliknya, jika ada praktek yang disebut pendidikan namun ternyata menghambat berkembangnya potensi kemanusiaan dengan berbagai bentuknya, ini tidak dapat disebut pendidikan. Demikian pula jika memperhatikan tujuan pendidikan seperti yang dikemukakan Illich, nampak bahwa misi pendidikan sejatinya adalah membuka akses dan peluang masyarakat untuk mengembangkan potensi diri mereka; mencakup dimensi spiritualitas, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Jika dihubungkan dengan masyarakat, bangsa, dan negara, maka relevansi pendidikan sangat terkait dengan pemberdayaan perilaku demokratis masyarakatnya.

Secara instruksional, nilai-nilai demokratis ditanamkan pada diri mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang mengacu pada aturan mata kuliah wajib atau mata kuliah pengembangan kepribadian. Pendidikan Kewarganegaraan (disingkat PKn) di perguruan tinggi memiliki fungsi untuk mendidik manusia Indonesia agar berkarakter demokratis; sehingga dengannya mereka dapat menjadi warga negara yang baik, cerdas, serta mampu berperan aktif di tengah masyarakat.

Tugas Pendidikan Kewarganegaraan adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan berbagai pengalaman akademik dan keterampilan sosial-kewarganegaraan yang memadai. Pendidikan Kewarganegaraan mengandung makna sebagai upaya mengubah perilaku warga negara ke arah yang positif melalui elaborasi pengetahuan dan pemahaman-pemahaman ilmiah yang didekatkan dengan kondisi obyektif masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman tersebut digunakan untuk justifikasi tindakan warga negara ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang ditemui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan syarat-syarat seperti: bermakna, integratif, berdasarkan nilai (*value-based*), menantang, relevan, dan aktif.

Namun demikian, fakta di lapangan belum menunjukkan kondisi yang ideal. Praktek pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (disingkat PPKn) yang ditemukan di FKIP UHAMKA seperti terjebak pada *rote learning* (menghafal). Contohnya dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa mahasiswa, ditemukan pandangan bahwa mahasiswa kerap merasa dituntut untuk memahami masalah-masalah sosial kenegaraan dengan hanya dibekali ceramah dosen dan teknik diskusi kelas yang arbitrer (mana suka). Bagi mahasiswa, hal ini tidak menimbulkan kesan apa-apa setelah mengikuti kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Peneliti lalu melakukan cek silang dengan bertanya pada beberapa dosen yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jawaban mereka juga cukup mengejutkan, para dosen menganggap tuntutan kurikulum PPKn di perguruan tinggi sangat padat dan tidak sebanding dengan alokasi waktu yang diberikan. Efek yang terjadi adalah penggunaan metode *sapu jagat* untuk penyampaian materi PPKn. Yang penting materi telah disampaikan sesuai dengan estimasi waktu meskipun belum menyentuh individuasi dan kristalisasi dalam diri mahasiswa.

Temuan masalah di lapangan cukup menggelisahkan karena ada dugaan bahwa secara akademik mahasiswa merasa tidak memahami masalah sosial-

kewarganegaraan dalam struktur kognisi, afeksi, dan implementasinya secara utuh sehingga memicu ketidakpedulian mereka terhadap urusan-urusan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengenai masalah ini, dibutuhkan pembelajaran terpadu/ integratif yang menginisiasi pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mahasiswa secara utuh untuk mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang optimal. Pembelajaran ini harus dapat mengaktivasi kesadaran mahasiswa, membekali kemampuan analisis dan sintesis mereka, serta membangun keyakinan dan harapan yang menguatkan identitas sebagai warganegara madani.

Dengan memperhatikan landasan hukum di Indonesia (Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta UU Sisdiknas), pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan harus menyentuh dimensi spiritualitas, karakter diri, kepedulian sosial, dan keterampilan berdharma di tengah masyarakat. Pada titik ini terlihat perlunya mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai khas yang ada di masyarakat. Dalam kaitannya dengan UHAMKA sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah, maka nilai-nilai khas tersebut adalah nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kemuhammadiyah dapat dipahami sebagai bentuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengangkat nilai-nilai khas institusi serta digunakan untuk memperkuat proses pembelajaran PPKn secara kontekstual. Jika nilai-nilai kemuhammadiyah memiliki relevansi dengan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kemuhammadiyah dapat dilaksanakan sejauh pembelajaran tersebut mengacu pada nilai-nilai luhur yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran ini harus dirancang untuk mengusung cita-cita etik dan profetik melalui upaya pemberdayaan manusia Indonesia sebagaimana termaktub dalam nilai-nilai luhur yang dianut masyarakatnya.

Setelah mempertimbangkan hadirnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kemuhammadiyah, maka ditelusuri referensi-referensi terkait model penguatan masyarakat demokratis pada Pendidikan Kewarganegaraan yang menggandeng nilai-nilai kemuhammadiyah. Namun, sejauh ini belum ditemukan penelitian/ karya ilmiah yang mengkaji penerapan Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggandeng materi kemuhammadiyah baik pada tataran kurikuler, teoretik, maupun programatik. Dengan demikian perlu dirancang Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis Kemuhammadiyah yang diturunkan dari konsep-konsep filosofis dalam materi PPKn ke tataran praksis yang bersifat eksperimental dan *inquiry*. Karena bersifat praksis, maka bentuk pembelajaran yang dianggap sesuai adalah pembelajaran partisipatori. Pembelajaran partisipatori dapat memfasilitasi proses belajar mahasiswa dengan mendekatkan mereka dengan objek yang sedang dipelajarinya, sekaligus juga terlibat dalam pemberdayaan orang-orang atau masyarakat dimana dia belajar. Dengan demikian, proses ini memenuhi apa yang telah disarankan oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai “*Jadilah Guru Sekaligus Murid*”.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dibutuhkan penelitian untuk merancang pembelajaran PPKn yang mengandung nilai-nilai kemuhammadiyah sekaligus bersifat partisipatoris. Oleh karena itu, dipilih paradigma profetik untuk menjembatani pembelajaran PPKn tersebut untuk meningkatkan kecerdasan berdemokrasi mahasiswa melalui mentalitas, kesadaran (*consciousness*), serta keterampilan mahasiswa yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warganegara dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi sehari-hari.

Setelah memperhatikan paparan masalah di atas, maka penting untuk di kaji penerapan pembelajaran PPKn bernuansa Profetik untuk meningkatkan kecerdasan berdemokrasi mahasiswa di FKIP UHAMKA.

B. Paradigma Penelitian

Mubarak Ahmad, 2014

PENERAPAN PEMBELAJARAN PPKn BERNUANSA PROFETIK UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN BERDEMOKRASI MAHASISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu

Moralitas merupakan substansi etis dari proses pembelajaran PPKn. Dengan demikian, PPKn berfungsi untuk memperkuat kompetensi warganegara yang didasarkan pada nilai moral Pancasila. PPKn hendaknya dikembangkan sebagai pendidikan etika untuk membangun peradaban bangsa Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yang dengan demikian tujuan utamanya adalah memperkokoh kehidupan demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai fundamental dalam Pancasila memiliki komitmen yang kuat pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai agama menjadi inspirasi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kecerdasan berdemokrasi warganegara ditumbuhkan dengan penguatan sikap kejujuran, integritas, komitmen, kedisiplinan, visioner, dan kemandirian.

Pembelajaran PPKn harus mendukung internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui proses belajar yang di dukung oleh keteladanan, penalaran, dan latihan pengambilan keputusan untuk memperkuat pertimbangan dalam bersikap dan bertindak sebagai warganegara demokratis. Dengan demikian, perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan syarat-syarat seperti bermakna, integratif, berdasarkan nilai (*value-based*), menantang, relevan, dan aktif. Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya juga berbasis pada nilai-nilai khas di masyarakat karena berhubungan dengan integritas diri terhadap keterakaran (*rooting*) sosial budaya dalam kehidupannya. UHAMKA sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah memaknai nilai khas institusi yang bercorak religius dengan memberlakukan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan di UHAMKA hendaknya dapat diintegrasikan dengan al-Islam dan Kemuhammadiyah. Model integrasi tersebut harus mengaktivasi kesadaran mahasiswa, membekali kemampuan analisis dan sintesis mereka, serta membangun keyakinan dan harapan yang menguatkan identitas sebagai warganegara madani.

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP UHAMKA sebagai berikut:

1. Dibutuhkan pembelajaran integratif yang dapat meningkatkan kecerdasan berdemokrasi mahasiswa melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
2. Dibutuhkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat meningkatkan kepedulian berdemokrasi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dibutuhkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses-proses demokrasi di tengah masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang telah teridentifikasi kemudian di dekati dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bernuansa Profetik (selanjutnya disingkat PPKn Profetik), yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seperti apa bentuk pembelajaran PPKn Profetik yang dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan berdemokrasi mahasiswa?
2. Bagaimana peningkatan kecerdasan, kepedulian, dan partisipasi mahasiswa dapat terlihat setelah mengalami pembelajaran PPKn Profetik di FKIP UHAMKA?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan pembelajaran PPKn Profetik untuk meningkatkan kecerdasan berdemokrasi mahasiswa di FKIP UHAMKA.

Mubarak Ahmad, 2014

PENERAPAN PEMBELAJARAN PPKn BERNUANSA PROFETIK UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN BERDEMOKRASI MAHASISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu

2. Mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran PPKn Profetik dalam meningkatkan kecerdasan berdemokrasi mahasiswa di FKIP UHAMKA.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berupaya menerapkan pembelajaran PPKn Profetik untuk meningkatkan kecerdasan berdemokrasi mahasiswa di FKIP UHAMKA. Melalui upaya ini, penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis; penelitian ini berguna untuk memperkuat argumentasi ilmiah dari PPKn Profetik untuk meningkatkan kecerdasan berdemokrasi mahasiswa melalui pendidikan formal.
2. Secara Praktis; penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:
 - a. Memperkaya macam-macam model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah ada selama ini.
 - b. Membuka solusi praktis dalam proses perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di FKIP UHAMKA.
 - c. Menambah pengetahuan dan keterampilan Peneliti yang sedang mendalami kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
 - d. Memenuhi sebagian syarat untuk meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd) dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
 - e. Menambah khazanah kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan melalui riset-riset di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.